

ABSTRAK

Seluruh dunia dihebohkan oleh munculnya virus corona atau sering disebut dengan covid-19, virus ini membuat perubahan besar didunia terutama di Indonesia, akibat dari virus ini dirasakan disegala aspek baik pendidikan, ekonomi maupun hukum. Jutaan manusia terjankit, hak-hak asasi manusia pun ikut terusik, pembatasan sosial berskala besar dilakukan hal ini tentu bertolak belakang dengan Hak asasi manusia yang telah dijamin dan dilindungi dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta Undang-undang Hak Asasi Manusia. Pelayanan hukum oleh kantor-kantor notaris khususnya di Kota Surakarta juga tidak luput dari dampak virus covid 19.

Dalam tesis ini penulis akan membahas tentang kebijakan sistem online dan *cyber notary* dalam menghadapi dampak covid-19 di kota surakarta serta penerapan sistem online dan *cyber notary* yang belum diadakan terkait dengan kebijakan hukum dalam menghadapi dampak covid-19 terhadap kinerja notaris di kota surakarta dan kendala-kendala serta solusi dalam menghadapinya.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan penelitian lapangan secara langsung dari responden yaitu notaris di kota Surakarta. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif analitis yang dimaksudkan untuk memberikan data seakurat mungkin tentang suatu kondisi atau gejala lain dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran secara jelas tentang kebijakan sistem online dan *cyber notary* dalam menghadapi dampak covid-19 di kota surakarta. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Permasalahan penelitian dianalisis dengan teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem online dan *cyber notary* belum dapat sepenuhnya dilaksanakan karena Notaris dan PPAT di Kota Surakarta beranggapan penandatanganan berkas dan akta yang dilakukan dengan tidak menghadap atau disaksikan langsung oleh notaris bertentangan dengan Undang-undang Jabatan Notaris. Kebijakan sistem online dan *cyber notary* akan digunakan oleh notaris PPAT di Kota Surakarta apabila sudah adanya peraturan hukum yang jelas. Kendala yang dihadapi dalam penggunaan sistem online dan *cyber notary* di Kota Surakarta yaitu adanya aturan yang bertolak belakang antara Pasal 15 dan Pasal 16 UUJN dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Solusi dari hal tersebut diatas adalah dibuatnya peraturan tambahan mengenai konsep *cyber notary* dalam UUJN atau dibentuk dalam perundang-undangan tersendiri sebagai peraturan yang bersifat materiil dan formiil secara konkrit, serta sosialisasi pasal 11 UUTE beserta kekuatan hukumnya dan pemberian dukungan penuh berupa fasilitas yang memadai untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan *cyber notary* di Indonesia.

Kata kunci : Covid-19, Cyber Notary, Kota Surakarta

ABSTRACT

The whole world was shocked by the emergence of the corona virus or often referred to as covid-19, this virus made major changes in the world, especially in Indonesia, the consequences of this virus were felt in all aspects, including education, economics and law. Millions of people are infected, human rights are also disturbed, large-scale social restrictions are carried out, this is certainly contrary to the human rights that have been guaranteed and protected in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the Human Rights Law. Legal services by notary offices, especially in the city of Surakarta, are also affected by the covid 19 virus.

In this thesis the author will discuss about the online system and cyber notary policies in dealing with the impact of covid-19 in the city of Surakarta as well as the application of the online and cyber notary systems that have not been implemented related to legal policies in dealing with the impact of covid-19 on the performance of notaries in the city of Surakarta and constraints. - constraints and solutions in dealing with them.

The approach method in this research is juridical empirical, data collection using literature study and field research directly from respondents, namely notaries in the city of Surakarta. The specifications used in this study are analytical descriptions that are intended to provide as accurate data as possible about a condition or other symptom and it is hoped that this research can provide a clear picture of the Online System Policy and Cyber Notary in Facing the Impact of Covid-19 in Surakarta City. The data were analyzed qualitatively and then presented descriptively. The research problems were analyzed with the theory of legal certainty and the theory of legal protection.

The results of this study indicate that the online and cyber notary systems have not been fully implemented because the Notary and PPAT in the City of Surakarta assume that the signing of documents and deeds made without appearing or being witnessed directly by a notary is contrary to the Law of Notary Position. PPAT notaries in Surakarta City will use the online and cyber notary system policies when there are clear legal regulations. The constraints faced in using the online system and cyber notary in Surakarta are the contradictory rules between Article 15 and Article 16 of the UUN associated with Law Number 11 of 2008 and Law Number 19 of 2016 concerning electronic information and transactions. The solution to the above is the making of additional regulations regarding the concept of cyber notary in UUN or being formed in separate laws as concrete and formal regulations, as well as socialization of article 11 of the UUN and its legal strength and providing full support in the form of adequate facilities to guarantee legal certainty in the implementation of cyber notary in Indonesia.

Keywords: *Covid-19, Cyber Notary, Notary*